

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara historis lahirnya hukum perburuhan di dunia terkait erat dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusi industri yang ditandai dengan penemuan mesin uap telah mengubah secara permanen hubungan buruh dan majikan. Penemuan mesin juga telah mempermudah proses produksi. Revolusi industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama mekanisasi ini adalah hilangnya industri kecil, jumlah buruh yang bekerja dipabrik meningkat, anak-anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja panjang, upah yang rendah dan perumahan yang sangat buruk. Keprihatinan utama yang didasari lahirnya hukum perburuhan adalah buruknya kondisi kerja dimana buruh anak dan perempuan bekerja terutama dipabrik tenun/tekstil dan pertambangan yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatannya<sup>1</sup>.

Di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu masa yang suram yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi (*sanksi poenale*). Pada awal kemerdekaan keadaan hukum kerja tidaklah begitu berarti atau kurang diperhatikan meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas diatur masalah ketenagakerjaan, khususnya dalam pasal 27 ayat (2): “tiap-tiap warga Negara

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>2</sup>. Namun hal ini terjadi karena perhatian pemerintah lebih condong untuk mempertahankan kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh belanda. Dengan demikian tidak ada sama sekali peraturan perundangan yang dikeluarkan pada awal kemerdekaan tersebut. Baru kemudian setelah Indonesia mempertahankan kedaulatannya pada tahun 1948 pemerintah mulai memerhatikan masalah ketenagakerjaan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Kemudian dalam era tahun 2000 sebagian besar dari peraturan undang-undang tersebut dicabut dan diganti yang kemudian lahir lah peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial<sup>3</sup>.

Dalam berbagai tulisan dibidang ketenagakerjaan sering dijumpai adagium yang berbunyi pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Adagium ini tampaknya biasa saja seperti tidak mempunyai makna tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bisa

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan dan tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional<sup>4</sup>.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan<sup>5</sup>.

Jumlah penduduk Indonesia yang melimpah apabila dapat didayagunakan secara optimal dan efisien akan menjadi aset yang sangat menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi demikian sudah menjadi fakta sejarah dinegara-negara yang memulai dan menyelenggarakan pembangunan nasionalnya. Sebagai contoh yang tidak dapat dipungkiri yaitu Negara Jepang dengan restorasi meizi yang memulai pembangunan nasionalnya dengan sumber daya alam yang minim dan bermodalkan puing-puing akibat kalah dalam perang dunia ke II melawan sekutu. Namun dengan bermodalkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi disertai etos kerja yang tinggi, dewasa ini jepang menjadi raksasa kekuatan ekonomi didunia yang sulit ditandangi oleh Negara lain<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Ibid, Zaeni Asyhadie hlm. 85

<sup>5</sup> Asri wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Jakarta: Sinar grafika, 2010, hml. 6

<sup>6</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Diindonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja<sup>7</sup>. Sedangkan yang dikatakan dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja /buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja<sup>8</sup>. Kemudian dalam peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan orang yang belum

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Hardijan Rusli, *hukum ketenagakerjaan berdasarkan uu no 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, bogor: ghalia Indonesia, 2011, hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pada pekerja atau buruh<sup>9</sup>.

Imam Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Kemudian pengertian hukum perburuhan ini dapat dikatakan mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Adanya peraturan
- b. Bekerja pada orang lain dan
- c. Upah<sup>10</sup>

Upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha<sup>11</sup>. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Asri wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Jakarta: Sinar grafika, 2010, Hlm. 1

<sup>10</sup> Ibid, Asri wijayanti, hlm. 3

<sup>11</sup> Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hlm. 95

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 86

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947 yang dimaksud dengan istilah upah ialah:

- a. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan
- b. Perumahan, makan, bahan makanan, dan pakaian dengan cuma-cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.

Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul “*principles of personal management*” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Batasan tentang upah menurut dewan penelitian perupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>13</sup>

Dalam undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 30 yang dikatakan dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

---

<sup>13</sup> Ibid, Kartasapoetra, Hlm. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>14</sup>.

Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya, yaitu harus dibayarkan lebih dahulu dari pada utang lainnya atau dengan kata lain, pekerja sebagai kreditur atas upahnya merupakan kreditur istimewa<sup>15</sup>. Dalam halnya pemberian upah kepada pekerja/buruh pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ini diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menaker<sup>16</sup>. Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal 4 ayat (1) yang dikatakan dengan penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah.

Dalam hal ini ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Uu No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 89

<sup>16</sup> Ibid, Hardijan Rusli, hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Teori upah normal

Menurut teori ini upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan pekerja/buruh atau tenaga kerja. Dengan teori ini ditegaskan kepada pekerja/buruh bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian besarnya karena memang hanya demikian kemampuan pengusaha

2. Teori undang undang besi

Menurut teori ini upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan teori upah normal diatas hanya memenangkan pengusaha. Sebab kalau teori itu yang dipergunakan mudah saja pengusaha mengatakan hanya itu kemampuannya tanpa berpikir bagaimana sulitnya pekerja/buruh itu, jadi harus ditantang.

3. Teori dana upah

Menurut teori ini pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang undang besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya didasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana jumlah besar maka akan besar pula upah yang diterima pekerja/buruh. Sebaliknya kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang diterima pekerja atau buruh pun akan berkurang

4. Teori upah etika

Menurut teori upah etika dikatakan sebenarnya bukanlah berapa besarnya upah yang diterima pekerja/buruh melainkan sampai seberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya<sup>17</sup>.

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota) dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materil kurang memuaskan
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup normal<sup>18</sup>.

Kewajiban utama pengusaha dengan adanya hubungan kerja dengan pekerja/buruh adalah membayar upah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 78

<sup>18</sup> Ibid, Zaeni Asyhadie, hlm 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu<sup>19</sup>. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah<sup>20</sup>.

Terdapat beberapa unsur dari perjanjian kerja:

1. Adanya unsur work atau pekerjaan
2. Adanya unsur perintah
3. Adanya waktu
4. Adanya upah<sup>21</sup>.

Secara konstitusional setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Kesamaan derajat dihadapan hukum tersebut merupakan asas hukum dalam melakukan hubungan antara para subjek hukum. Namun perlu diingat bahwa dalam hubungan kerja ada karakteristik lain yang dalam realitanya seorang majikan akan lebih bebas daripada seorang buruh. Kondisi demikian terjadi karena sepanjang seseorang adalah orang yang menerima pekerjaan dibawah perintah orang lain dengan mengharapkan imbalan upah mereka selalu berada dipihak yang lemah dibanding pihak yang memberikan pekerjaan, sehingga diantara mereka ada hubungan yang bersifat subordinasi. Kondisi demikian lebih diperparah lagi dengan adanya krisis yang multidimensi yang berkepanjangan

<sup>19</sup> Senjdjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2001, Hlm 63

<sup>20</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali, 1992, Hlm 23

<sup>21</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia. Dalam kenyataannya pihak penerima kerja dan sekaligus pencari kerja semakin lama jumlahnya semakin banyak baik karena pemutusan hubungan kerja akibat banyaknya perusahaan yang bangkrut, relokasi kenegara lain atau akibat semakin banyaknya pertumbuhan angkatan kerja yang belum tersalurkan. Dengan demikian, sumber daya manusia di Indonesia hanya unggul dalam segi kuantitas tanpa didukung keunggulan secara kualitas. Kondisi demikian membuat kedudukan majikan sebagai pemberi kerja dan sekaligus upah beserta keunggulan fasilitasnya akan selalu kuat jika berhadapan dengan buruh selaku pencari kerja dengan segala kelemahannya.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan pasal 90 dikatakan bahwa:

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penanguhan.
- (3) Tata cara penanguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesepakatan dimaksud lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kenyataan dilapangan pelaku usaha masih ada yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, masih adanya pekerja/buruh yang mendapatkan upah dibawah upah minimum. Padahal didalam undang-undang ketenagakerjaan telah jelas mengatakan bahwa pelaku usaha atau pengusaha dilarang untuk memberikan upah dibawah upah minimum yang telah ditetapkan. Undang-undang ini pun juga menjelaskan dalam pasal 1 angka 5 mengatakan pelaku usaha atau pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia<sup>23</sup>.

Hal ini jelas mengatakan bahwa pelaku usaha baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum berkewajiban memberikan upah standar atau upah minimum yang telah ditentukan baik usaha tersebut milik sendiri maupun perusahaan atau usaha tersebut bukan milik sendiri.

Dalam halnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka disetiap provinsi diatur lagi sedemikian rupa upah kabupaten/kota. Adapun upah minimum kabupaten/kota seprovinsi riau, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1	Kota Pekanbaru	Rp. 2.352.577,25,-
2	Kota Dumai	Rp. 2.655.372,50,-
3	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.323.450,94,-
4	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.440.845,00,-
5	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.342.160,00,-
6	Kabupaten Kampar	Rp. 2.315.002,03,-
7	Kabupaten Bengkalis	Rp. 2.685.547,03,-
8	Kabupaten Siak	Rp. 2.392.249,23,-
9	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.356.039,60,-
10	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.389.835,25,-
11	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.341.555,75,-
12	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.305.346,13,-

Data: Keputusan Gubenur Riau

Berdasarkan pada gambaran diatas penulis menjumpai masih adanya pelaku usaha yang tidak membayarkan kariawannya dengan upah minimum seperti kariawan toserba di kecamatan tampan kota pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut disadari beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN TOSERBA DIKECAMATAN TAMPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

**B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang menyangkut dalam penelitian ini maka penulis membatasinya yakni pada “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN TOSERBA DIKECAMATAN TAMPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan gejala diatas terkait Pelaksanaan Pembayaran Upah Karyawan Toserba Dikecamatan Tampan Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah karyawan toserba ditinjau menurut undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya upah yang diberikan oleh pengusaha terhadap karyawan toserba?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Karena itu, terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.<sup>24</sup>

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah karyawan toserba ditinjau menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya upah yang diberikan oleh pengusaha terhadap karyawan toserba.

---

<sup>24</sup> Buku Panduan Akademik, (fakultas syariah & hokum universitas islam negeri sultan syaraif kasim riau, 2011), hlm12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar sarjana hukum (S1/strata satu) pada fakultas syariah dan hukum universitas sultan syarif kasim riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan upah tenaga kerja sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di toserba.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi penelitian**

Pendekatan penelitian dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu<sup>25</sup>.

2. Sumber data penelitian

Sehingga pada penelitian skripsi ini menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang hukum mengenai pada pelaksanaan pembayaran upah karyawan toserba di kecamatan tampan ditinjau dari undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Materi dalam penelitian ini diambil dari data-data primer dan sekunder. Adapun data-data yang dimaksud adalah :

a. Bahan hukum primer

yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian kelompok, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya yang diperoleh melalui media-media cetak maupun media elektronik.

3. Metode pengumpulan data

Adapun dalam memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung.

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Angket yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus diisi secara langsung oleh kariawan/pekerja toserba dikecamatan tampan kota pekanbaru.
- c. Studi kepustakaan yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

#### 4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian skripsi ini penulis memilih dikecamatan tampan panam kota pekanbaru.

- a. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi riau
- b. Toserba di kecamatan tampan kota pekanbaru

#### 5. Populasi dan sampel penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti dapat berupa impunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>26</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan elemen dengan sengaja<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Bambang sunggono, metodologi penelitian hukum, Jakarta: rajawali pers, 2011, hlm.118

<sup>27</sup> J.supranto, metodologi penelitian hukum dan sosial, Jakarta: rineka cipta, 2003, hlm.35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Kepala bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja	1 Orang	1 Orang
2	Karyawan toserba kecamatan tampan	55 Orang	29 Orang

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi ini, maka penulis akan membuat dalam (5) lima bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam bab pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Berisikan gambaran umum lokasi penelitian

**BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Tinjauan umum penelitian ini terdiri dari kajian umum hukum tentang pelaksanaan pembayaran upah karyawan serta peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

**BAB IV HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembayaran Upah Karyawan Toserba Dikecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampan Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Diantaranya juga terdapat pada bab ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upah pembayaran karyawan toserba ditinjau menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya upah yang diberikan oleh pengusaha terhadap karyawan toserba.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan bagian penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian skripsi ini, dimana dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya dalam penelitian skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**